

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT.DKI)

Yessy Tarina Zahra<sup>1</sup>, Firman Wijaya<sup>2</sup>, Louisa Yesami Krisnalita<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

### ABSTRAK

Pasien adalah seseorang yang memerlukan suatu pengobatan baik di rumah sakit maupun balai pengobatan lainnya. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat signifikan karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Pengaturan perlindungan hukum pasien dalam berbagai peraturan dibuat oleh Pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan antara berbagai pihak dalam pelayanan kesehatan. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat, risiko yang dihadapi semakin tinggi. Di samping dokter, maka pasien juga memerlukan perlindungan hukum yang proporsional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan karena kelalaian.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, konsumen jasa, pelayanan medik.

### ABSTRACT

*The patient is someone who needs treatment in both the hospital and other treatment centres. Doctors as one of the main components of providing health services to the community have a very significant role because they are directly related to the provision of health services and the quality of services provided. The regulation of patient legal protection in various regulations is made by the Government to protect the interests of various parties in health services. Patients are known as recipients of health services and from the hospital as health care providers in the field of health care. Patients as consumers of services in the field of medical services, by seeing the rapid development of health science and technology, the risks faced are increasingly high. Besides the doctor, the patient also requires proportional legal protection regulated in legislation. Such protection is primarily directed at the possibilities that doctors make mistakes due to negligence.*

**Keywords:** legal protection, consumer services, medical services.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah

nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-

organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia adalah salah satu tindak kejahatan yang paling tua di dunia yang merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Bahkan diperhitungkan merupakan tindak pidana internasional dengan nilai keuntungan terbesar ketiga di dunia di bawah kejahatan perdagangan senjata ilegal dan perdagangan narkoba.<sup>1</sup> Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.<sup>3</sup> Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak

dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, diperlukan adanya kerja sama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.<sup>4</sup>

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> KPAI, "Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)," [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses 24 Oktober 2018.

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 129.

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

<sup>5</sup> Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara*

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan orang mengingat ancaman yang berat tersebut.

Dari penjelasan di atas maka masalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang, menarik untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Maka dalam hal ini penulis tertarik menulis penelitian dalam penulisan jurnal ini.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT.DKI?

### **Tujuan Penelitian**

Sebagai penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian ini bertujuan menemukan sifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

### **PEMBAHASAN**

#### **Perjanjian Terapeutik**

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan.<sup>6</sup> Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.

Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.<sup>7</sup> Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln

---

*Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

---

<sup>6</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 142.

<sup>7</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 45.

yang mengartikan kontrak atau perjanjian terapeutik dengan “kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbinten*) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultatsverbinten*).<sup>8</sup>

Berdasarkan mukadimah kode etik kedokteran Indonesia yang dituangkan dalam keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/MEN.KES/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran bagi para dokter Indonesia yang dimaksud dengan perjanjian terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan oleh suasana saling percaya serta senantiasa diliput oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Perjanjian terapeutik tersebut disamakan *inspaningsverbinten* karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadi mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu:<sup>9</sup>

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determinations*).
2. Hak atas dasar informasi (*the right to informations*).

Hubungan hukum dalam kontrak terapeutik oleh undang-undang kita diinterpretasikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga

kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi.

Pengertian perjanjian terapeutik di atas oleh undang-undang dimaknai berbeda, karenanya Salim HS, menyempurnakan pengertian perjanjian terapeutik, yaitu sebagai kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.<sup>10</sup>

Dalam pengertiannya tersebut perjanjian terapeutik dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya subjek perjanjian, meliputi pasien dengan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi;
2. Adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien; dan
3. Kewajiban pasien, membayar biaya penyembuhan.

### Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>12</sup> Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>9</sup> Hermien Hadiati Koeswadi, *Loc.cit.*, hlm. 143.

<sup>10</sup> Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 140.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan perlindungan hukum pasien dalam berbagai peraturan dibuat oleh Pemerintah (pembuat kebijakan) dalam rangka melindungi kepentingan antara berbagai pihak dalam pelayanan kesehatan. Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, melindungi.<sup>15</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga

kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Jasa**

Berbicara mengenai pasien sebagai konsumen dalam kaitannya di dalam pelayanan medis, di mana terdapat hubungan antara tenaga pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan konsumen adalah

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>16</sup>

Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. Lain halnya pendapat dari Hondius (Pakar masalah Konsumen di Belanda) menyimpulkan, bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa. Jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan

<sup>13</sup> Anonim, “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum,” *Harian Republika*, 24 Mei 2018.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (LN No. 6 Tahun 2002) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419).

<sup>15</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses 30 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821), Pasal 1 ayat (2).

<sup>17</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 1.

baik.<sup>18</sup> Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasien sebagai konsumen adalah individu (orang) yang menggunakan jasa dalam hal ini layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dalam kaitannya dengan kesehatan. Orang yang menggunakan jasa tersebut adalah orang yang menginginkan akan adanya pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.<sup>19</sup>

Dalam pelayanan di bidang medis, tidak terpisahkan akan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini pasien. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan.

Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga

kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya.

Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat, risiko yang dihadapi semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, misalnya terdapat kesederajatan. Di samping dokter, maka pasien juga memerlukan perlindungan hukum yang proporsional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan karena kelalaian.

Hak konsumen kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kesehatan adalah:

1. Informasi;
2. Memberikan persetujuan;
3. Rahasia kedokteran; dan
4. Pendapat kedua (*second opinion*).

Kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur;
2. Beritikad baik;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **PENUTUP**

1. Lahirnya hubungan dokter dan pasien, serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan, dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien

<sup>18</sup> Fokky, "Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam," <http://www.uai.ac.id/index.php/en/hukum/247-perlindungan-konsumen-pangan-dalam-perspektif-islam>, diakses 26 Oktober 2018.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat, risiko yang dihadapi semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, misalnya terdapat kesederajatan. Di samping dokter, maka pasien juga memerlukan perlindungan hukum yang proporsional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan karena kelalaian.

2. Pihak pasien yang dirugikan sebagai konsumen jasa pelayanan di bidang medik dapat menuntut ganti rugi. Kepuasan pasien harus menjadi pandangan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan, apabila pelayanan kesehatan yang diberikan memuaskan, maka rumah sakit itu pun akan dipandang baik oleh masyarakat. Sedangkan apabila pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memuaskan dan cenderung merugikan pasien, maka pasien berhak menuntut ganti kerugian kepada rumah sakit. Mengenai penuntutan ganti rugi oleh pasien terhadap tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya."
3. Bentuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor

33/Pdt/2015/PT.Mdn, Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa dengan dikabulkan eksepsi dari Terbanding IV semula Tergugat IV, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), sehingga Pokok Perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak mempunyai alasan hukum yang tepat.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Kbj dapat dikuatkan, akan tetapi karena pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dicantumkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, menurut Pengadilan Tinggi berlebihan, maka amar putusan tentang eksepsi perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Kansil, C.S.T. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.



Mansyur, Dikdik Arief dan Elistaris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (LN No. 6 Tahun 2002).

### **Surat Kabar**

Anonim. "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum." *Harian Republika*. 24 Mei 2018.

### **Internet**

Fokky. "Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam." <http://www.uai.ac.id/index.php/en/hukum/247-perlindungan-konsumen-pangan-dalam-perspektif-islam>. diakses 26 Oktober 2018.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses 30 Oktober 2018.

KPAI. "Waspada Bahaya Perdagangan Orang (*Trafficking*) dan Penyelundupan Manusia (*Smuggling*)."  
[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id).  
Diakses 24 Oktober 2018.